

REALISASI APBD TA 2022, TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURAKARTA TAK TERCAPAI



Sumber Gambar :

<https://radarbali.jawapos.com/bali/23/11/2021/duh-realisasi-pad-buleleng-terancam-tak-capai-target/>

Isi Berita :

RADARSOLO.COM – Banyak faktor yang menyebabkan PAD Kota Bengawan tak memenuhi target. Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa menyampaikan pengantar nota keuangan Wali Kota Surakarta atas rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Kota Surakarta TA 2022 di DPRD Kota Surakarta.

Secara garis besar realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta tahun anggaran (TA) 2022 pada item pendapatan daerah mencapai 94,23 persen.

Pendapatan daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 2.152.000.000.000 lebih, dapat terealisasi sebesar Rp 2.028.000.000.000 lebih, kurang dari anggaran sebesar Rp 124 miliar lebih atau 5,77 persen.

Teguh mengungkapkan, secara ringkas realisasi pendapatan daerah TA 2022 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp 740.143.000.000 lebih, yang terealisasi sebesar Rp 647.440.000.000 lebih atau 87,48 persen, kurang dari anggaran sebesar Rp 92.702.000.000 lebih. “PAD TA 2022 kurang 12,52 persen,” ungkapnya

Teguh menyebut, pada item pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp 1.412.000.000.000 lebih terealisasi sebesar Rp 1.376.000.000.000 lebih atau 97,43 persen, kurang dari anggaran sebesar Rp 36.318.000.000 lebih atau 2,57 persen.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp 0, terealisasi sebesar Rp 4.800.000.000,” sebut dia.

Teguh menyebut ada sejumlah aspek yang membuat target PAD tahun lalu tak berhasil direalisasikan. Salah satunya, dikarenakan tingginya target PAD yang ditetapkan tahun lalu. “Kemudian ada yang di *refocusing*,” ucap Teguh.

Bahkan menurut Teguh anggaran yang harus di-*refocusing* tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu menurut dia tidak tercapainya target PAD tahun lalu tidak lepas karena perubahan regulasi.

“Yang ini menjadikan kami belum maksimal, termasuk beberapa yang mungkin fasilitas, lalu pasar belum 100 persen ditarik retribusi,” sambung dia.

Faktor lain yang membuat PAD 2022 tidak maksimal karena pengajuan keringanan dalam penyelenggaraan sejumlah *event*. “Ya banyak, misalnya kita ada *event-event* besar, hotelnya minta diskon dan sebagainya,” urai dia.

Namun Teguh percaya berbagai *event* itu mempunyai dampak positif bagi masyarakat, utamanya pelaku usaha Solo. “Ini kan sebagai penopang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Memang dampaknya belum 100 persen. Ini semua sedang proses. Karena termasuk belum teraih semuanya retribusi untuk PKL yang di semua sudut ada,” kata dia.

Teguh mengatakan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Surakarta per 31 Desember 2022 menorehkan hasil pemeriksaan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. (atn/nik/dam)

Sumber Berita :

1. <https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/206467/jawaban-pemkot-solo-perihal-pad-2022-tak-capai-target>, “Jawaban Pemkot Solo Perihal PAD 2022 Tak Capai Target”, tanggal 6 April 2023
2. <https://dprd.surakarta.go.id/sejumlah-fraksi-pertanyakan-realisisi-pad-tak-penuhi-target/>, “Sejumlah Fraksi Pertanyakan realisasi PAD Takenuhi Target”, tanggal 6 Juni 2023
3. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/07/06/2023/realisasi-apbd-ta-2022-target-pad-kota-surakarta-tak-tercapai/>, “Realisasi APBD TA 2022, target PAD Kota Surakarta Tak Tercapai”, tanggal 7 Juni 2023
4. <https://mettanews.id/kurang-rp-77-miliar-sejumlah-fraksi-pertanyakan-realisisi-pad-2022-tak-penuhi-target/>, “Kurang Rp77 Miliar, Sejumlah Fraksi Pertanyakan Realisasi PAD 2022 Tak Penuhi Target”, tanggal 6 Juni 2023

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05